

SEKS BEBAS & DISTRIBUSI HIV/AIDS

Teza Yudha¹, Rachmat Ramdani²,

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang
teza.yudha@fisip.unsika.ac.id

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang
rahmatramdani014@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan perekonomian nasional serta tingginya arus globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pola perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat modern kontemporer sebagai produk hasil dari sumbangan konstruksi kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi sehingga memunculkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu dari masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah seks bebas dan distribusi HIV/AIDS sebagai sebuah fakta sosial masyarakat modern yang menakutkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implemmentasi program penanggulangan seks bebas dan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang serta kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga kelemahan dalam penanganan seks bebas dan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang: Tidak adanya peraturan daerah yang khusus untuk menangani seks bebas serta penanggulangan dampaknya yakni penyebaran HIV/AIDS, banyaknya faktor penghambat yang cukup dominan, serta minimnya dukungan publik dalam pelaksanaan penanganan seks bebas dan penanggulangan distribusi HIV/AIDS.

PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang dibalut dalam semangat kapitalisme menjadikan masyarakat modern kontemporer menjadi tidak mudah untuk menghindar dari permasalahan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu masyarakat modern memerlukan adaptasi diri yang cepat dalam merespon setiap skema perubahan sosial, seperti yang diungkapkan Kartono (2003:5) bahwa kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu serta merugikan orang lain.

Perkembangan pembangunan di suatu daerah merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dampak dari pembangunan akan disertai dengan munculnya berbagai tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tidak terkecuali pemenuhan kebutuhan orang akan hiburan. Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah yang sangat pesat pembangunannya, salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia berdiri di sini, sehingga tidak mengherankan jika kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Karawang didominasi oleh karyawan terutama buruh pabrik dan buruh tani. Kemudian di sepanjang wilayah bagian utara Kabupaten Karawang berbatasan langsung dengan bibir pantai Laut Jawa, maka tidak sedikit masyarakat di pesisir utara Kabupaten Karawang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dengan demikian Kabupaten Karawang menjadi wilayah sasaran urbanisasi dari berbagai daerah dari dalam maupun luar pulau Jawa, dan menjadikan daerah ini begitu sensitif terhadap dinamika sosial maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan yang memicu munculnya permasalahan sosial di masyarakat.

Kehidupan masyarakat urban yang terkungkung dalam kalkulasi industri tidak terlepas dari kebisingan dan hingar-bingar aktivitas kota, kepenatan dalam bekerja serta segala tetek-bengek urusan sehari-hari sangat menyita pikiran dan tenaga membuat

seseorang merasa perlu untuk membebaskan dirinya dari beban kerja yang menyiksa dengan mencari hiburan (*pleasure*). Dengan pengertian hiburan di sini sebagai aktivitas pribadi dengan makna eksistensial (pemenuhan kebutuhan, kepuasan, dan kreativitas pribadi). Dalam berbagai kasus kita akan menjumpai berbagai motif hiburan ini ke dalam berbagai bentuk kegiatan, namun perlu diingat, puncak pencarian seseorang akan hiburan adalah hubungan seksual. Konstruksi norma dan budaya seringkali bertabrakan dengan fantasi individu yang beragam memungkinkan individu yang tidak dapat mengakses hubungan seksual karena tidak terlegitimasi di dalam lembaga perkawinan, mereka akan tetap mencari pemenuhan kebutuhan seksual dengan berbagai cara meski bertentangan dengan norma bahkan agama. Dengan demikian meningkatnya perilaku seks bebas selain dengan pasangan resminya tidak lagi terbantahkan.

Pemenuhan kebutuhan seseorang akan hubungan seksual ini pernah disampaikan oleh Abraham Maslow yang berbicara tentang seksualitas dengan membalutnya ke dalam salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*), Maslow mengemukakan suatu teori tentang motivasi manusia yang membedakan antara kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) dan metakebutuhan-metakebutuhan (*metaneeds*). Kebutuhan dasar meliputi: rasa lapar, kasih sayang (afeksi), rasa aman, harga diri, dan sebagainya. Sedangkan metakebutuhan meliputi: keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dasar adalah kebutuhan akibat kekurangan (tidak bisa tidak, harus terpenuhi). Sedangkan metakebutuhan-metakebutuhan adalah kebutuhan untuk pertumbuhan (pengembangan diri). (Hall, Lindzey, 2005:111)

Secara substansial seks merupakan bagian utama dari hasrat pemenuhan kebutuhan badaniah. Ia adalah bagian dari konsumsi yang diperlukan oleh tubuh. Hal ini senada dengan ajaran psikoanalisis Freud dan pengikutnya yang mengasumsikan bahwa sumber energi tingkah laku manusia yang terbesar adalah seks. Dalam pembahasan seks bebas pada masyarakat industri di Kabupaten Karawang ini, kita seperti telah diingatkan kembali oleh Giddens bahwa seksualitas seseorang telah banyak dipengaruhi secara politik maupun ekonomi: “Sejarah emosional masyarakat modern adalah sejarah pencarian seksual laki-laki yang dipisahkan dari diri publik mereka. Kontrol seksual perempuan oleh laki-laki lebih dari sekedar sebuah kebetulan kehidupan sosial modern.” (Giddens, 2004:ix) Pendapat dari Giddens tentang seksualitas yang ditinjau melalui kajian struktur sosial ini, akan lebih jelas jika dikorelasikan dengan psikoanalisis dari Freud yang menjelaskan, bahwa tujuan seksual laki-laki adalah pelepasan produk-produk seksual. Hal ini tidak berlawanan dengan tujuan sebelumnya, yakni pencapaian kesenangan atau kenikmatan. (Freud, 2014:114)

Masyarakat urban yang terkungkung dalam kalkulasi industri dihadapkan kepada sederet persoalan hidup sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menjadi aspek pemicu beberapa persoalan yang sering mengiringi seks bebas seperti pelacuran, perdagangan jasa seksual wanita melalui berbagai kegiatan hiburan karaoke, panti pijat dan spa plus-plus, club dan pub, seks bebas di kamar-kamar kosan dan kontrakan, perkawinan dini karena hamil duluan yang berakhir dengan perceraian, seks bebas dalam kenakalan remaja, pemaksaan seksual atau perkosaan, disorientasi seksual seperti lesbian dan gay, biseksual dan transgender, hingga penggunaan narkoba untuk merasakan kesenangan dan ketenangan sesaat. Sederet aspek pemicu tersebut menambah permasalahan yang menunggu untuk segera ditangani pemerintah. Sehingga mau tidak mau, persoalan sensitif yang berlatar belakang semacam itu merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karawang.

Dengan kondisi demikian, diperkirakan akan menambah daftar faktor pendorong meningkatnya jumlah masyarakat berperilaku berisiko tinggi terhadap distribusi

HIV/AIDS. Fenomena tersebut akan berdampak pada persoalan distribusi penyakit HIV/AIDS mengancam masyarakat, apabila hal ini tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah akan berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat di era modern ini. Industri *seks* di Indonesia mampu meraup US\$ 3,3 Milyar, atau sekitar Rp 42,9 Triliun per tahun (estimasi US\$ 1 /Rp 13 Ribu, tahun 2017), sesuatu yang cukup mengejutkan untuk sebuah industri bawah tanah (Lim, 2005:233). Pada level nasional fenomena ini bisa kita lihat data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mencatat sampai akhir tahun 2012 saja ada 6,7 juta pria Indonesia yang menjadi pelanggan pekerja *seks* komersial (PSK) sehingga menjadi kelompok paling berisiko tinggi untuk menyebarkan penyakit maut HIV-AIDS.

Di Kabupaten Karawang sendiri, Pemerintah daerahnya hingga saat ini belum mampu menangani fenomena seks bebas sekaligus mengendalikan dampak yang bisa ditimbulkannya yaitu penyebaran HIV/AIDS yang semakin hari semakin meluas dan nyaris tidak terkendali secara struktural. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang fenomena seks bebas dan penanggulangan distribusi HIV/AIDS, hingga sekarang yang menjadi acuan pelaksanaan program dari penanggulangan distribusi HIV/AIDS hanya berpedoman pada Keputusan Gubernur Jabar No. 441/Kep.21-Yansos/2005 Tentang KPA, Surat keputusan Bupati Karawang Nomor: 443.2/Kep.78-Huk/2010 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang dan Program Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang.

Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki perangkat kebijakan yang serius untuk merespon fantasi masyarakat dewasa ini atas dampak dari geliat industrialisasi dan pembangunan sistem komunikasi global yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang fenomena seks bebas dan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang serta melihat bagaimana upaya pemerintah dengan program penanggulangan HIV/AIDS tersebut berusaha mengendalikan dan mengatasi persoalan ini. Pendekatan teoritis yang di gunakan oleh peneliti sebagai kerangka untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan analisis implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode ini memungkinkan peneliti untuk dapat melihat lebih dekat fenomena-fenomena yang terjadi tentang seks bebas dan distribusi HIV/AIDS, serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumentasi yakni menelusuri informasi-informasi melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang sebagai *leading sektor* dalam penanggulangan HIV/AIDS di daerah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEKS BEBAS & DISTRIBUSI HIV/AIDS

Kartono (2003), menyatakan bahwa salah satu bentuk perilaku seks bebas adalah hubungan seks kelamin yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman seksual secara berlebihan. Sementara itu, Desmita (2012) mendefinisikan perilaku *seks* bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu sampai melakukan kontak seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma.

Berdasarkan pengertian di atas bisa kita pahami bahwa seks bebas adalah hubungan seksual untuk mendapatkan kenikmatan atas dorongan seksual dari kematangan organ seksual. Perilaku seks bebas sebagai aktivitas seksual yang dilakukan dua lawan jenis maupun sesama jenis tanpa ada ikatan resmi pernikahan.

Selanjutnya, Sylvia & Wilson (dalam Hutapea, Ronald.2011) AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immunodeficiency Syndrome* suatu kumpulan gejala penyakit yang didapat akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. HIV/AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau disingkat AIDS merupakan sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau *Human Immunodeficiency Virus*. Virus AIDS menyerang sel darah putih khusus yang disebut dengan *T-lymphocytes*. HIV yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor.

Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. AIDS merupakan penyakit yang paling ditakuti pada saat ini, AIDS selama virus tersebut secara serius merusak sistem kekebalan sehingga membuat mereka lemah dan mudah terserang terinfeksi beberapa di antaranya menyebabkan kematian. HIV ditularkan melalui cairan tubuh kebanyakan dalam darah, sperma, cairan vagina dan ASI.

Dengan demikian, menjadi suatu kebutuhan yang cukup fundamental bagi peneliti untuk membuat suatu kerangka yang menganalisis fenomena seks bebas dan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang, dengan melakukan kajian secara komprehensif mengenai implementasi kebijakan melalui metode yang ditawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier untuk meninjau kembali kebijakan program penanggulangan distribusi HIV/AIDS yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar No. 441/Kep.21-Yansos/2005 Tentang KPA, Surat keputusan Bupati Karawang Nomor: 443.2/Kep.78-Huk/2010 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang dan Program Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang.

Selanjutnya, Mazmanian dan Sabatier (1983:81) menyebut bahwa konsep atau pemikiran implementasi sebagai "*frame work, for implementation Analysis*". Dalam rangka analisis itu menekankan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan pemerintah adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan institusi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sabatier dan Mazmanian (dalam Agustino, 2006: 163-167) variabel yang dimaksud adalah Struktur manajemen program yang mengoperasionalkan kebijakan menstrukturkan secara tepat proses implementasi dan faktor-faktor di luar peraturan, yaitu pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengertian dari implementasi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan kebijakan yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Selanjutnya, implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan

kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana program penanggulangan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang. Tingginya arus urban ke Kabupaten Karawang memicu meningkatnya fenomena seks bebas di daerah ini termasuk banyaknya kebutuhan akan rumah-rumah kosan dan kontrakan bagi pendatang di Kabupaten Karawang yang semakin memperbesar potensi praktek seks bebas di dalam kamar-kamar kosan dan rumah kontrakan tersebut tanpa adanya batasan tertentu. Tidak dapat dipungkiri praktek seks bebas ini begitu bias dan tidak mudah untuk membuktikannya, peneliti hanya dapat menelusuri berbagai informasi dan fakta sosial baik secara langsung maupun yang bisa didapat melalui akses virtual. Tidak ada yang bisa memastikan secara pasti apa-apa yang terjadi di balik kamar kosan dan kontrakan dengan berbagai kegiatan yang berjalan setiap harinya. Peneliti hanya bisa mengidentifikasi fenomena kamar-kamar kosan dan rumah kontrakan tersebut seringkali digunakan oleh para penghuninya, baik kalangan pekerja, mahasiswa maupun para pelajar sebagai tempat tinggal bersama sekaligus arena mesum yang cukup nyaman bersama pasangannya masing-masing. Belum lagi penginapan dan hotel yang sudah jelas saat ini jumlahnya sangat signifikan sama-sama berpotensi besar untuk disalahgunakan, semarak seks bebas dan pelacuran dengan berbagai macam motif dan jenisnya sungguh telah berkembang dan tersebar di Kabupaten Karawang.

Dampak dari seks bebas yang tidak terkendalikan ini sangat berpotensi menimbulkan penyakit menular mematikan seperti HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (IMS) dengan tingkat penyebarannya yang setiap tahun terus meningkat, dirasa menjadi pukulan yang cukup telak bagi pemerintah Kabupaten Karawang agar sesegera mungkin mencari solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini. “Dari laporan kasus yang ada, bahwa modus utama penulaan HIV di negeri ini adalah melalui hubungan seks, terutama yang heteroseksual.” (Sedyaningsih, Mamahit, 2010:xivii)

Jumlah kasus seks bebas yang terdata setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, tempat-tempat yang dijadikan tempat mesum, pelacuran dan seks bebas lainnya seolah tidak bisa dihilangkan karena terus tumbuh bersama beberapa aspek lain sebagai penunjang keberadaannya, walaupun secara rutin pemerintah melakukan operasi preventif hingga tindakan represif, akan tetapi nyatanya hingar-bingar dunia seks bebas semakin bersemarak sampai dengan saat ini.

Selanjutnya fenomena seks bebas dalam dunia pelacuran di Kabupaten Karawang tidak hanya peneliti temukan di satu lokasi saja. Seperti halnya Stasiun Rusak (Seer) , Kobak Biru, Jalan Pantura serta pelacuran di berbagai tempat panti pijat dan karaoke menjadi lokasi favorit bagi para lelaki yang tengah mencari wadah pelampiasan hasratnya. Di Jalan Pantura misalnya, dengan memperlambat laju kendaraannya, para lelaki ini melihat-lihat perempuan-perempuan cantik pemandu lagu sekaligus pekerja seks sambil mencari yang sesuai dengan selera birahinya. Dorongan syahwat yang sudah diujung alat kelamin ini diamini dengan panggilan dan rayuan manja di pinggir jalan dari bibir wanita yang merah merekah seolah menjadi sumber pembasuh dahaga akan kenikmatan seksual yang diidam-idamkan. Di dalam benaknya kira-kira ada keyakinan bahwa dengan kehangatan perempuan yang berbeda, maka kesenangan dan kepuasan yang didapat akan berbeda.

Tabel 1
Identifikasi tempat yang sering digunakan sebagai lokasi seks bebas
di Kabupaten Karawang¹

NO	KECAMATAN	JML	NAMA TEMPAT	KETERANGAN
1	Karawang Kota dan Karawang Barat	1	Buah Hasem, Tanjung Pura	Lokasi Prostitusi
		2	Sangkalan, Kel. Tanjung Pura	Lokasi Prostitusi
		3	Seer, Kel. Nagasari	Lokasi Prostitusi
		4	Gor Panatayuda, By Pass	Lokasi Mangkal
		5	Lap. Karangpawitan, By Pass	Lokasi Mangkal
		6	De***	Panti Pijat Plus-plus
		7	D'C***	Panti Pijat Plus-plus
		8	D'M***	Panti Pijat Plus-plus
		10	D'P***	Panti Pijat Plus-plus
		11	Fo***	Panti Pijat Plus-plus
		12	Qu***	Panti Pijat Plus-plus
		13	1**	Lokasi Mangkal
		14	Stadion Singaperbangsa	Mangkal Waria
		2	Karawang Timur	1
2	Peundeuy, Kondang Jaya			Lokasi Prostitusi
3	Telukjambe Barat	1	Kobak Biru	Lokasi Prostitusi
4	Klari	1	Tanjakan Geot, Sumur Kondang	Lokasi Mangkal
		2	Area Bendungan Walahar	Lokasi Mangkal
		3	Pancawati di depan Kanzen	Lokasi Mangkal
		4	Am**	Panti Pijat Plus-plus
5	Rengasdengklok	1	Cikelor	Lokasi Prostitusi
		2	Pos Banjir	Lokasi Prostitusi
		3	Maningkem KW 10	Lokasi Prostitusi
6	Cikampek	1	Sekitar Terminal Cikampek	Lokasi Mangkal
		2	Di Bawah Jembatan Playover	Lokasi Mangkal
		3	Sepanjang Jalur Pantura Cikampek	Lokasi Mangkal
		4	Berbagai Panti Pijat dan Karaoke	Pelayanan plus-plus
7	Purwasari	1	Dara Wolong	Lokasi Prostitusi
		2	Semplo	Lokasi Prostitusi
		3	Belendung Tanggul	Lokasi Prostitusi
8	Lemah Abang	1	Gang Sempit	Lokasi Prostitusi
9	Telagasari	1	Linggarsari	Lokasi Mangkal
10	Cilamaya Kulon	1	Tegal Landak	Lokasi Prostitusi
		2	Cigobang	Lokasi Prostitusi
11	Cilamaya Wetan	1	Kedoya	Lokasi Prostitusi
		2	Sutil	Lokasi Prostitusi
		3	Gundul Jaya	Lokasi Prostitusi
		4	Bedeng	Lokasi Prostitusi
12	Pedes	1	Sungai Buntu	Lokasi Prostitusi
		2	Betok Mati	Lokasi Prostitusi
		3	Pantai Samudera	Daerah Mangkal
13	Tempuran	1	Banir	Lokasi Prostitusi
14	Cibuaya	1	Pantai Cemara Jaya	Lokasi Mangkal
15	Batujaya	1	Pantai Pakis Jaya	Lokasi Mangkal

Alasan meningkatkan taraf hidup sampai membawa mereka ke dalam situasi yang cukup ekstrim dengan melacurkan diri dan disetubuhi dengan mengabaikan standar-standar kesehatan dan menggantinya dengan standar ekonomis. Sedikit masih beruntung jika

¹ Data diolah dari berbagai sumber, Tahun 2017.

pelanggannya bersedia menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual dengannya ketika itu. Dengan demikian tidak heran jika setiap tahunnya penyebaran penderita HIV/AIDS di Kabupaten Karawang terus meningkat. Terlebih para penderita HIV/AIDS ini tidak dapat disembuhkan. Ketika pria menyewa pelacur untuk melakukan hubungan seksual adalah bahwa mereka menginginkan kepuasan yang mungkin tidak bisa mereka dapat dengan pasangan resminya, dan berhubungan badan dengan menggunakan kondom merupakan bentuk reduksi dari kenikmatan hubungan seksual, setidaknya seperti itulah yang dipikirkan sebagian besar laki-laki.

Tabel 2
Kasus HIV Dan AIDS Di Kabupaten Karawang²

HIV/AIDS	Sex	Narkoba	Homosex	Waria	Perempuan	Pria
50,2 %	56 %	24%	6%	2%	36%	64%

Berdasarkan data tabel di atas, dari Laporan tahunan komisi penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang ditemukan kasus HIV dan AIDS kasus HIV/AIDS sudah meningkat mencapai 34,4 % kasus. Jika melihat faktor penularan Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Karawang tidak jauh berbeda dengan kasus di daerah lainnya yaitu faktor penularan melalui hubungan seks bebas. Pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS tentu harus memiliki landasan atau pelaksanaan program. Adapun penyediaan landasan pelaksanaan program (dokumen) telah dikeluarkan pemerintah dan merupakan dasar dari pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS antara lain sebagai berikut: *Pertama*, kesepakatan International terutama deklarasi dari UNGASS HIV/AIDS Tahun 2001 (*United Nation General Assembly Special Session on HIV/AIDS*). *Kedua*, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. *Ketiga*, Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2006 tentang KPA Nasional. *Keempat*, Per-Menko Kesra No.03/Per/Menko/Kesra/III/2007 Tentang susunan, Tugas dan fungsi Keanggotaan KPA Nasional. *Kelima*, Per-Mendagri No. 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas merupakan dasar atau acuan-acuan dalam pelaksanaan penanggulangan AIDS/HIV di Kabupaten Karawang. Hal ini tentu memudahkan KPA Kabupaten Karawang dalam melakukan penentuan tujuan. Namun, menurut pandangan peneliti masih terdapat kekurangan dalam KPA Kabupaten Karawang yaitu belum memiliki Peraturan daerah yang mengatur tentang secara spesifik penanggulangan AIDS/HIV di Kabupaten Karawang, yang ada hanya keputusan Bupati Karawang dan itu pun sifatnya umum. Sehingga landasan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karawang belum diatur secara terperinci.

Pemerintah pusat juga belum menunjukkan keseriusan cara penanggulangan perilaku seks bebas dan distribusi HIV/AIDS, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program dari KPA nasional masih mengacu kepada peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2006 dari KPA Nasional pun belum memiliki Undang-undang tentang penanggulangan HIV/AIDS. Kondisi ini pun sama dengan KPA Kabupaten Karawang belum memiliki peraturan daerah sebagai acuan yang lebih spesifik untuk mengatur penanggulangan KPA hal ini menjadi kelemahan dari KPA Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan SKPD dan pelaksanaan dilapangan hanya mengandalkan keputusan Bupati Karawang yang menjadi landasan hukumnya.

² Laporan Tahunan Komisi Penanggulangan AIDS Tahun 2017.

Selanjutnya, terdapat peningkatan anggaran untuk KPA dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karawang di tahun 2016 dan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia agar seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Karawang dapat terjangkau oleh program penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Karawang. Menurut peneliti perlu disadari bahwa fenomena penyebaran kasus HIV/AIDS ini seperti suatu gunung es, sebagian kecil puncaknya terlihat diatas permukaan air, tetapi lebih banyak bagian yang tak terlihat karena berada di bawah permukaan air. Artinya istilah dari fenomena gunung es tersebut terkait HIV/AIDS bahwa orang yang terinfeksi HIV/AIDS yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya, kemungkinan bagian yang lebih besar biasanya tersembunyi dan tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Berkaitan dengan sumber dana dalam pelaksanaan dari program penanggulangan AIDS/HIV sebagai penentu dari keberhasilan dari program tersebut, sumber dana yang dimiliki oleh KPA Kabupaten Karawang mesti sampai pada program pencegahan dan mengidentifikasi pada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian KPA Kabupaten Karawang harus segera membuat peraturan daerah yang spesifik dalam penanggulangan HIV/AIDS yang dapat mengatur pelaksanaan program secara komprehensif.

Dalam rangka menyelamatkan generasi muda dan masyarakat, KPA Kabupaten Karawang terus meningkatkan sosialisasi pada populasi umum (pelajar, ibu rumah tangga, pemuda dan lain-lain) dan populasi kunci (Penasun, WPS, Pelanggan, Waria, LSL) Dengan melibatkan banyak pihak baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, swasta dan lain-lain³. Keterbukaan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karawang melakukan strategi ditunjukkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV/AIDS serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar individu dan masyarakat menjadi produktif dan bermanfaat untuk menjalankan aktivitas dengan pola hidup sehat.

Program penanggulangan HIV/AIDS pencegahan terbagi kepada populasi tinggi (populasi kunci) dan populasi rendah (populasi umum). Program pencegahan pada populasi tinggi antara lain Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dan *Harm Reduction*. Berdasarkan program PMTS ini merupakan program akselerasi yang bersifat komprehensif yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu penguatan pemangku kepentingan di lokasi, komunikasi perubahan perilaku manajemen pasokan kondom dan pelicin serta pengobatan IMS di Puskesmas. Selain itu monitoring insentif pada setiap komponen dan evaluasi perubahan perilaku sasaran dari program ini terutamat adalah Wanita Pekerja Seksual (WPS) dan pelanggan di lokasi.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dari dukungan masyarakat. Pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di KPA Kabupaten Karawang memang belum melibatkan masyarakat secara langsung, namun dukungan masyarakat tetap ada dalam bentuk masukan, saran, pemberian informasi maupun keterlibatan dan lain-lain yang membantu dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karawang.

Keikutsertaan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan program tersebut. Berkenaan dengan sikap masyarakat merupakan salah satu kunci penting keberhasilan dari program penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kabupaten Karawang. Sejak Perpres Nomor 75 Tahun 2006 untuk pengembangan

³ Laporan KPA Kabupaten Karawang Tahun 2011.

program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi mesti adanya dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti orang-orang atau kelompok penduduk yang terdampak dari populasi kunci, masyarakat sipil termasuk organisasi keagamaan, sektor pemerintahan, sektor swasta dan media untuk mengetahui bagaimana sikap mereka terhadap program penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kabupaten Karawang. Berkaitan dengan hal ini KPA Kabupaten Karawang dalam menjalankan kerjasama dan koordinasi dengan *civil society* atau LSM dianggap masih kurang maksimal, koordinasi yang terselenggara dianggap hanya bersifat rutinitas belaka tanpa ada tindak lanjut dan kerjasama yang kongkrit sebagaimana LSM yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS, menurut pandangan peneliti sangat penting mendorong keterlibatan berbagai pihak dengan diiringi penguatan sistem komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis implemmentasi program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karawang belum berjalan efektif. Fenomena seks bebas dan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang faktanya tidak mudah untuk ditanggulangi oleh pemerintah tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Karawang harus segera memformulasikan kebijakan melalui peraturan daerah yang secara spesifik mengatur dan mengendalikan fenomena seks bebas dan berbagai dampak buruk yang melingkupinya seperti distribusi HIV/AIDS yang semakin meluas.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J.W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desmita. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Foucault, Michel. 2000. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Gramedia.
- Freud, Sigmund. 2014. *Manifesto Seksualitas*. Yogyakarta: Titah Surga.
- Fromm, Erich. 2007. *Cinta, Seksualitas dan Matriarki: Kajian Komprehensif Tentang Gender*. Bandung: Jalasutra.
- Giddens, Anthony. 2004. *Transformation of Intimacy: Seksualitas, Cinta dan Erotisme dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Fresh Book.
- Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner. 2005. *Teori-teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hoogerwef, 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Hutapea, Ronald. 2011. *AIDS & PMS dan Pemerksaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ihsan, Soffa. 2006. *Now Its Time to Sex: Pelacuran, Legalisasi dan Agama*. Jakarta: Panta Rei.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi sosial*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Lim, Gerrie. 2005. *Invisible Trade (Perdagangan Terselubung): Seks Komersil Kalangan Atas Singapura*. Jakarta: GagasMedia.
- Sedyaningsih, Endang R. & Mamahit. 2010. *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Soedjono. 1974. *Patologi Sosial: Gelandangan, Narkotika, Alkoholisme Pelacuran, Penyakit Jiwa dan lain-lain*. Bandung: Alumni.

- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Syarbaini, Syahrial. dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Grealia Indonesia.
- Soekanto Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sopiah, Pipih. 2009. *Lindungi Pelajar Dari Serangan Virus HIV/AIDS*. Bandung: Elisa Surya Dwitama
- Truong, Thanh-Dam. 1992. *Seks Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.